

Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Meri Darlina¹⁾; Yannizar²⁾; Siti Hodijah³⁾

¹⁾ Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

²⁾ Bappeda Kabupaten Kerinci

³⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstract

This research tried to investigate the analysis of consistency between planning and budgeting in education departement of Jambi Province year 2011 to 2015 which viewed by the planning and budgeting document of education in Jambi Province such as; RPJMD year 2010-2015, Renstra year 2010-2015, RKPD yaer 2011-2015, Renja year 2011-2015, PPAS year 2011-2015, RKA year 2011-2015, and DPA of APBD Education department year 2011-2015. The result of the analysis continuously was analyzed by using Matrik of Planning and Budgeting Consolidation (MKPP) for investigate level of consistency that occur and analyzed what kind of factors which caused inconsistency and what kind of effort has been done to create consistency between planning and budgeting. The result showed level of planning and budgeting consistency between document of planning and budgeting still low. The highest consistency available in PPAS document and APBD document. The cause of inconsistency is leader policy, human resources limitedness, less coordination between sub-department and SKPD, high frequency of leader commutation and goverment's role changing. Efforts are being made to achieve consistency between planning and budgeting is the functional improvement of human resource planning, improved coordination between field and education and the establishment of an electronic planning system (E-Planning).

Keyword : Consistency, Planning, Budgeting, Education, Region Government

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 yang dilihat dari dokumen perencanaan dan penganggaran pendidikan di Provinsi Jambi seperti RPJMD Tahun 2010-2015, Renstra Tahun 2010-2015, RKPD Tahun 2011-2015, Renja 2011-2015, PPAS Tahun 2011-2015, RKA Tahun 2011-2015, dan DPA Dinas Pendidikan APBD Tahun 2011-2015. Hasil analisa tersebut selanjutnya di analisis dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) untuk mengetahui tingkat konsistensi yang terjadi dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan inkonsistensi serta upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD. Penyebab ketidakkonsistenan adalah kebijakan pimpinan, keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya koordinasi antar bidang dan SKPD, sering terjadinya pergantian pejabat, dan perubahan peraturan pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah peningkatan

kualitas sumberdaya manusia fungsional perencana, peningkatan koordinasi antar bidang dan SKPD dan pembentukan sistem perencanaan elektronik (E-Planning).

Kata Kunci : Konsistensi, Perencanaan, Penganggaran, Pendidikan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah khususnya provinsi jambi dimana terdapat misi kedua pembangunan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan beragama dan berbudaya yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan , sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan misi pemerintah daerah tentunya tergambar dalam dokumen perencanaan yang terstruktur antar dokumen, RPJMD memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur jambi periode 2010-2015, harus berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renja disusun berdasarkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), renja SKPD sudah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran.

Mewujudkan visi Dinas pendidikan provinsi jambi tentunya tidak terlepas dari permasalahan selama ini yang dihadapi yaitu tidak konsistennya perencanaan dan penganggaran, antar dokumen perencanaan seperti tidak terdapatnya program dan kegiatan dalam RPJMD, tetapi ada dalam Renstra, kegiatan yang ada dalam Renstra tetapi tidak ada pada Renja SKPD dan terkadang kegiatan yang telah tersusun dalam renja SKPD tiba-tiba hilang pada saat penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) hal ini tentunya menggambarkan perencanaan yang tidak konsisten antar dokumen perencanaan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan, khususnya bidang pendidikan oleh pemerintah. Tidak konsistennya perencanaan dan penganggaran tentunya menunjukkan buruknya siklus perencanaan dan penganggaran. Hal ini tentunya peningkatan pembangunan bidang pendidikan tidak dapat terwujud pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; 2) Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; 3) Menganalisis upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan data sekunder dan primer. Objek yang diteliti adalah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meliputi RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA, PPAS, RKA dan DPA. Pendekatan analisisnya adalah dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran

(MKPP) untuk mengetahui tingkat konsistensi yang terjadi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2010-2015 dengan RPJMD Provinsi Jambi

RPJMD memuat 5 program sedangkan Renstra memuat 7 program. Dari 7 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 5 program pada RPJMD sedangkan 2 program yaitu (1) program pendidikan anak usia dini dan (2) program manajemen pelayanan pendidikan tidak terdapat dalam RPJMD. Artinya 71,43 persen program pada Renstra yang konsisten dengan program pada RPJMD sedangkan 28,57 persen tidak sesuai, Sebagaimana terdapat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Konsistensi Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD Provinsi Jambi

Status Program	Renstra	
	Jumlah Program	%
Konsisten	5	71,43
Tidak Konsisten Tidak ada di RPJMD, ada di Renstra	2	28,57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jambi

Memperhatikan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 (SPPN) pasal 7 dan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 pasal 25 serta peraturan pemerintah nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD. Program pada Renstra konsisten 100 persen dengan program pada RPJMD menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum memahami dan menjalankan fungsi sepenuhnya dalam menjalankan rencana daerah.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh rini (2008) di Solok Selatan, menyatakan bahwa konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD Dinas Pendidikan konsistensi digambarkan dengan angka 75 persen. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh febie (2011) RPJMD memuat 13 program sedangkan Renstra memuat 10 program. Dari 10 program tersebut, 7 diantaranya bersesuaian dengan 13 program pada RPJMD sedangkan 3 program lainnya tidak sesuai dengan program RPJMD . Artinya hanya 70 persen program pada Renstra yang konsisten dengan program RPJMD.

Konsistensi Renja dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Konsistensi Renja dengan Renstra pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana terlihat pada tabel 2.sebagai berikut:

Tabel 2. Konsistensi Renja dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

Status Program		2011		2012		2013		2014		2015	
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg
Konsisten	Jml	6	66	6	68	7	59	7	78	7	75
	%	55.00	54.00	60.00	60.55	63.63	40.98	63.63	42.62	100	84.27
Tidak konsisten	Jml	5	57	4	43	4	85	4	105	0	14
	%	45.00	46.00	40.00	39.45	36.37	59.02	36.37	57.38	0	15.73

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Tabel 2. menggambarkan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2011 terdiri atas 7 program dan 105 kegiatan. Dari 7 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 7 program pada renstra artinya 100 persen program renja konsisten. Dari 105 kegiatan pada renja, 66 kegiatan bersesuaian dengan 66 kegiatan pada renstra, sedangkan 39 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 62.85 persen kegiatan pada renja konsisten dan 37.15 persen tidak konsisten.

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2012 terdiri dari 6 program dan 88 kegiatan. Dari 6 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 6 program pada renstra artinya 100 persen program renja konsisten. Dari 88 kegiatan pada renja, 66 kegiatan bersesuaian dengan 66 kegiatan pada renstra, sedangkan 22 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 75.00 persen kegiatan pada renja konsisten dan 25.00 persen tidak konsisten.

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2013 terdiri dari 7 program dan 120 kegiatan. Dari 7 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 7 program pada renstra artinya 100 persen program renja konsisten. Dari 120 kegiatan pada renja, 59 kegiatan bersesuaian dengan 59 kegiatan pada renstra, sedangkan 61 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 49.16 persen kegiatan pada renja konsisten dan 50.84 persen tidak konsisten.

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2014 terdiri dari 11 program dan 160 kegiatan. Dari 7 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 7 program pada renstra artinya 100 persen program renja konsisten. Dari 160 kegiatan pada renja, 78 kegiatan bersesuaian dengan 78 kegiatan pada renstra, sedangkan 82 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 48.75 persen kegiatan pada renja konsisten dan 51.25 persen tidak konsisten.

Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2015 terdiri dari 7 program dan 89 kegiatan. Dari 7 program tersebut diantaranya bersesuaian dengan 7 program pada renstra, artinya 100 persen program renja konsisten. Dari 89 kegiatan pada renja, 75 kegiatan bersesuaian dengan 75 kegiatan pada renstra, sedangkan 14 kegiatan tidak bersesuaian dengan renstra, artinya 84.27 persen kegiatan pada renja konsisten dan 15.73 persen tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini (2008) di Solok Selatan menemukan hasil yang berbeda dimana konsistensi antara dokumen Renstra SKPD dengan Renja SKPD menunjukkan konsistensi dengan angka 100 persen.

Dari uraian konsistensi Renja dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2011-2015 terlihat belum sepenuhnya konsisten atau berkesinambungan. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang ada di Renja tidak ada didalam Renstra. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.

Konsistensi Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan RKPD Provinsi Jambi

Konsistensi Renja dengan RKPD tahun 2011-2015 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tergambar pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Konsistensi Renja dengan RKPD tahun 2011-2015

No	Status Program	2011		2012		2013		2014		2015		
		Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	Konsisten	Jml	7	43	10	82	11	126	11	96	7	89
		%	64.00	35.00	100	75,22	100	87.50	100	52.45	100	100
2	Tidak konsisten	Jml	4	80	0	27	0	18	0	87	0	0
		%	36.00	65.00	0	24.78	0	12.5	0	47,55	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jambi

Tabel 3. menunjukkan tingkat konsistensi yang baik hingga sangat baik pada program yaitu berkisar antara 64.00 persen hingga 100.00 persen. Tingginya tingkat konsistensi program ini menunjukkan bahwa penyusunan program pada Renja telah berpedoman pada RKPD. Konsistensi kegiatan sangat rendah terjadi pada tahun 2011 dan 2014 yaitu berkisar antara 35.00 persen hingga 52.45 persen, rendahnya tingkat konsistensi kegiatan ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan kegiatan pada Renja masih banyak yang tidak berpedoman pada RKPD. Sedangkan untuk tahun 2012,2013 dan tahun 2015 tingkat konsistensi kegiatan berkisar 75.22 persen hingga 100.00 persen. Tingginya tingkat konsistensi kegiatan ini menunjukkan bahwa penyusunan kegiatan pada Renja telah berpedoman pada RKPD.

Konsistensi RKA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan PPAS

Konsistensi RKA dengan PPAS Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Terlihat pada Tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 4. Konsistensi RKA dengan PPAS Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2011-2015

No	Status Program		2011		2012		2013		2014		2015	
			Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg
1	Konsisten	Jml	12	97	11	143	11	125	11	114	11	120
		%	100	100	100	100	100	99.20	100	87.69	100	100
2	Tidak konsisten	Jml	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0
		%	0	0	0	0	0	0.80	0	12.30	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jambi

Tabel 4. menunjukkan tingkat konsistensi program sudah sangat baik dari tahun 2011-2015 tingkat konsistensi program menunjukkan angka 100.00 persen. Tingginya tingkat konsistensi pada program hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKA telah berpedoman pada PPAS. Demikian juga halnya dengan tingkat konsistensi pada kegiatan sudah sangat baik yaitu berkisar antara 87.69 hingga 100.00 persen. Tingginya tingkat konsistensi kegiatan ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKA telah berpedoman pada PPAS.

Konsistensi APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan PPAS

Konsistensi APBD dengan PPAS Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2011-2015 tergambar pada Tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 5. Konsistensi APBD dengan PPAS Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2011-2015

No	Status Program		2011		2012		2013		2014		2015	
			Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg
1	Konsisten	Jml	12	99	11	142	11	104	11	117	11	110
		%	100	99.00	100	98.61	100	80.62	100	97.50	100	100
2	Tidak konsisten	Jml	0	1	0	2	0	25		3	0	0
		%	0	1.00	0	1.39	0	19.38		2.50	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jambi

Tabel 5. menunjukkan tingkat konsistensi program yang sangat baik, yaitu konsisten 100.00 persen ini artinya dalam penyusunan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah berpedoman pada PPAS. Demikian juga halnya dengan konsistensi kegiatan juga terlihat tingkat konsistensi yang sangat baik yaitu berkisar antara 87.69 persen hingga 100.00 persen.

Konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program dan kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator konsistensi tersebut diatas. Konsistensi anggaran dihitung berdasarkan perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan pada PPAS sebagaimana terlihat pada Tabel 6. sebagai berikut :

Tabel 6. Persentase deviasi anggaran APBD terhadap PPAS

No	Tahun	<5%	<10%	<20%	<30%	<40%	<50%	>50%	Konsisten
1	2011	32	9	11	6	5	4	23	3
2	2012	18	5	14	12	7	5	48	8
3	2013	18	10	11	9	5	5	23	23
4	2014	52	17	12	4	3	1	9	18
5	2015	36	7	16	5	8	1	16	18

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Faktor-faktor Penyebab Inkonsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat beserta staf pada BAPPEDA, pejabat beserta staf pada Dinas Pendidikan provinsi jambi, pejabat beserta staf pada BPKAD dan DPRD provinsi jambi, terutama yang terkait langsung dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut kutipan wawancara :

Kebijakan Pimpinan

Kebijakan pimpinan yang meminta untuk memasukkan kegiatan baru yang dianggap sangat penting, padahal kegiatannya tidak ada dalam renstra hal ini menyebabkan inkonsistensi perencanaan penganggaran. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pejabat pada dinas pendidikan:

“Kadang-kadang ada kegiatan direktif dari atasan kita mereka menganggap kegiatan itu penting, hal ini tentunya kita kan mesti mengakomodir kegiatan ini, walaupun kegiatannya tidak ada di Renstra, ya ini kan kegiatannya penting mau nggak maulah kita laksanakan, tinggal kitalah lagi yang pintar-pintar menterjemahkan kegiatan yang dimaksudkan pimpinan kita”.

Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Keterbatasan sumberdaya manusia merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas pendidikan Provinsi Jambi berada pada bidang-bidang, di program hanya mengakomodir program dan kegiatan yang diajukan oleh bidang-bidang, tetapi terkadang dalam penyusunan anggaran tidak mempedomani Renstra, bahkan kepala bidang tidak memegang hard copy Renstra, sehingga penyusunan anggaran copy paste dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, hal ini diakui oleh salah satu pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pejabat pada dinas pendidikan :

“Pemahaman aparatur terhadap sistematika mekanisme perencanaan tidak sepenuhnya memahami, fungsi perencanaan itu ada dibidang-bidang bukan diprogram saja. Kasubbag Program hanya mengkompilasi usulan-usulan perencanaan dari bidang-bidang, nah sekarang coba

tanya mereka di bidang-bidang megang dak renstra, renja? Jadi pekerjaan dibidang-bidang pekerjaan yang berulang-ulang dari tahun ketahun, dari pertama saya duduk disini ada kegiatan FLSN, O2SN yang selalu diulang-ulang terus, nggak tau apakah itu ada dalam renstra atau masuk renja main kopi paste saja”.

Semestinya kepala bidang yang ada di Dinas Pendidikan harus mempunyai dan memahami dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja sehingga penyusunan program dan kegiatan benar-benar telah berpedoman pada dokumen perencanaan bukan copy paste saja.

Sedangkan menurut salah satu staf pada Dinas Pendidikan inkonsistensi karena terkadang yang menyusun Renja tidak mengacu pada Renstra, sehingga isi antara Renja dengan Renstra tidak konsisten. Staf yang ditunjuk untuk menyusun Renja terkadang tidak memahami dokumen apa yang mesti dipedomani. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu staf pada Dinas Pendidikan :

“Kadang orang buat renja lupa mengacu pada renstra kadang main masuk be yang penting selesai, kadang yang mengusulkan lupa harus mengacu kesitu karena tidak paham, kita sebagai staf yang penting kerjakan saja, staf kurang ngerti atasan tidak menunjukkan”.

Kurang koordinasi antar bidang dan SKPD

Menurut salah satu staf di Bappeda Rancangan anggaran dari Dinas Pendidikan sering terlambat menyampaikan kepada Bappeda, sementara kegiatan pada Dinas Pendidikan banyak sehingga Bappeda kesulitan untuk mengoreksi dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kutipan wawancaranya :

“rancangan anggaran disdik tidak pernah ngasih diawal detik-detik akhir baru ngasih akhirnya pas koreksi iyo sudahlah, surat disampaikan, sudah dikasih batas waktu, sudah disampaikan tapi tetap saja terlambat”.

Semestinya rancangan anggaran disampaikan tepat waktu sehingga rancangan anggaran dapat dikoreksi dengan lebih teliti.

Jawaban yang hampir sama dari salah satu pihak dari anggota DPRD yang menyatakan bahwa kadang-kadang SKPD sering tidak tepat waktu menyampaikan rancangan anggaran, sehingga waktu mengoreksi singkat, sehingga hasilnya tidak maksimal. Sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Batas waktu koreksi usulan anggaran kan tidak banyak, terkadang SKPD sering terlambat ngasih usulan jadi ya dikoreksi gitu-gitu sajalah, akhirnya tidak maksimal kita mengoreksi, hasilnya juga tidak maksimallah”.

Pergantian Pejabat

Pergantian pejabat baik kepala dinas maupun kepala bidang hal ini sering menyebabkan inkonsistensi perencanaan dengan penganggaran karena pejabat yang baru kesulitan memahami program dan kegiatan yang ada sehingga pejabat yang baru membuat kegiatan yang baru yang dianggap penting. Hal ini diakui oleh salah satu staf pada Dinas Pendidikan. Berikut kutipan wawancara :

“Pergantian pejabat baik itu kepala dinas maupun kepala bidang, mereka mengusulkan program dan kegiatan yang baru padahal kegiatan itu tidak ada di renstra, terkadang mereka menganggap bahwa kegiatan itu penting”.

Perubahan peraturan pemerintah

Perubahan peraturan pemerintah pada saat dokumen perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan, sehingga program dan kegiatan yang diajukan banyak dievaluasi oleh mendagri. Evaluasi terutama menyangkut perubahan kewenangan pendidikan. Sebagaimana kutipan wawancara dari salah satu pejabat di Dinas Pendidikan berikut ini :

“Evaluasi mendagri sehingga apa yang telah kita tuangkan dalam renja banyak yang dievaluasi biasanya yang dievaluasi mendagri mengenai kewenangan. Renja kita kan susun satu tahun sebelum tahun ajaran anggaran dijalankan kadang terjadi perubahan peraturan pemerintah, kita biasanya yang sering berubah bukan kewenangan lagi”.

Upaya Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Supaya perencanaan dan penganggaran terintegrasi, konsisten dan mengikat maka ada beberapa upaya yang dilakukan, sebagaimana jawaban dari beberapa responden berikut. Menurut salah satu pejabat pada Dinas Pendidikan bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, tentunya pihak-pihak terlibat langsung dalam proses penyusunan rancangan anggaran benar-benar harus memahami dan mempedomani dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti : RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, dan KUA PPAS. Berikut kutipan wawancara :

“Tentunya kita harus mengingatkan kembali pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar tetap mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan yaitu RPJMD, Renstra, Renja, RKPD dan KUA-PPAS maka perencanaan dan penganggaran kita tentunya konsisten”.

Selanjutnya ditambahkan oleh pejabat di Dinas pendidikan, bahwa mewujudkan konsistensi sudah seharusnya pada awal penyusunan Renstra dirapatkan dengan melibatkan semua kepala bidang di Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh kepala Dinas, dengan demikian Renstra yang disusun telah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan dan tidak akan dirubah lagi. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut :

“Awal perumusan Renstra benar-benar harus di rapatkan dengan kepala-kepala bidang yang menjalankan/ bertanggungjawab langsung dengan kegiatan yang dipimpin langsung oleh kepala dinas, dimana pada saat awal tahun Renstra disusun yakinkan betul semua yang akan kita laksanakan 5 tahun kedepan, program dan kegiatannya harus masuk dalam Renstra”

Kemudian ditambahkan oleh salah satu staf Dinas pendidikan berikut ini kutipan wawancara :

“semestinya ada memory serah terima jabatan, apa-apa yang telah dirumuskan oleh pejabat lama diserahkan kepada pejabat yang baru sehingga pejabat yang baru sudah tahu apa saja langkah-langkah harus dilakukan kedepannya, jadi pejabat yang baru tinggal meneruskan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh pejabat sebelumnya”.

Selanjutnya ditambahkan oleh staf lainnya di Dinas Pendidikan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini :

“pengadaan E-Planning sistem perencanaan elektronik dimana pada awal tahun Renstra dimasukkan semua nama-nama program kegiatan kedalam E-Planning dan dikonekkan ke Simda jadi dalam tanda kutip diharamkan yang namanya mengganti nama kegiatan, Jadi ketika menginput program kegiatan baru hal ini nanti tidak bisa karna sistem sudah terkoneksi ke simda”.

Hasil wawancara dengan staf di Bappeda :

“Simda itu harus terkoneksi dengan perencanaan di bappeda, jadi tidak ada lagi yang namanya kegiatan baru yang muncul begitu kita masukkan kegiatan yang tidak ada di sistem langsung nolak, selama ini simda masih manual, sistem tapi masih manual”.

Hasil wawancara dengan staf di BPKAD :

“buy sistem dikunci, adminnya kan ada di kita, nama kegiatan yang disistem sudah diinput sesuai dengan RKPD jadi SKPD tidak bisa menginput kegiatan baru”.

Kutipan wawancara dengan pejabat di BPKAD :

“Kebijakan yang akan kami lakukan untuk kedepannya akan kami lakukan rapat teknis pra penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disitulah dijelaskan substansi kegiatan dan pegkodean rekening dan lain sebagainya yang terkait dengan proses penyusunan APBD”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsistensi program yang ada pada Renstra terhadap program yang ada pada RPJMD adalah sebanyak 71.34 persen.
2. Konsistensi program dan kegiatan yang ada pada Renja terhadap program dan kegiatan yang ada pada Renstra adalah 54.54 persen dan 55.00 pada tahun 2011. Tahun 2012 adalah 60.00 persen dan 60.55 persen. Tahun 2013 adalah 63.63 persen dan 40.98 persen. Tahun 2014 terdapat 63.63 persen dan 42.62 persen dan tahun 2015 terdapat 100.00 persen dan 84.27 persen.
3. Konsistensi program dan kegiatan yang ada pada Renja terhadap program dan kegiatan yang ada pada RKPD adalah 64.00 persen dan 35.00 persen pada tahun 2011. Tahun 2012 terdapat 100.00 persen dan 75.22 persen. Tahun 2013 terdapat 100.00 persen dan 87.50 persen. Tahun 2014 terdapat 100.00 persen dan 52.45 persen sedangkan pada tahun 2015 terdapat 100.00 persen dan 100.00 persen.
4. Konsistensi program dan kegiatan yang ada pada RKA terhadap program dan kegiatan yang ada pada PPAS adalah 100.00 persen dan 100.00 persen pada tahun 2011. Tahun 2012 konsistensi program mencapai 100.00 persen dan kegiatan juga mencapai 100.00 persen. Tahun 2013 programnya 100.00 persen dan kegiatannya 99.20 persen. Tahun 2014 programnya 100.00 persen dan kegiatannya 87.69 persen sedangkan untuk tahun 2015 program 100.00 persen dan kegiatannya 100.00 persen konsisten.

5. Konsistensi program dan kegiatan yang ada pada APBD terhadap program dan kegiatan yang ada pada PPAS adalah 100.00 persen dan 99.00 persen pada tahun 2011. Tahun 2012 programnya 100.00 dan kegiatannya mencapai 98.61 persen. Tahun 2013 100.00 persen dan 80.62 persen. Tahun 2014 program dan kegiatannya 100.00 persen dan 100.00 persen sedangkan untuk tahun 2015 juga 100.00 persen dan 100.00 persen konsisten.
6. Konsistensi Anggaran APBD dengan PPAS pada tahun 2011 dengan tingkat konsistensi kecil dari 50 persen (<50 %) berjumlah 4.30 persen, tahun 2012 berjumlah 4.27 persen, tahun 2013 4.80 persen, tahun 2014 0.86 persen sedangkan untuk tahun 2015 berjumlah 0.93 persen.
7. Ketidakkonsistenan program dan kegiatan pada dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran disebabkan oleh hal sebagai berikut :
 - a. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan dokumen harus diakomodir dengan penyusunan program dan kegiatan pada PPAS (Dana DAK).
 - b. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang kewenangan pelaksanaan sebuah program.
 - c. Pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas yang rendah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - d. Ketidakmatangan SKPD dalam menyusun dokumen.
 - e. Kurangnya pengetahuan staf perencana Dinas Pendidikan terhadap proses perencanaan dan penganggaran.
 - f. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.

Saran-Saran

Agar konsistensi perencanaan dan penganggaran tetap terpelihara, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Bappeda semestinya diberi kedudukan yang lebih tinggi dari SKPD lainnya agar Bappeda dapat memberikan pengarahan dan kontrol pada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD.
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang proses penyusunan APBD untuk seluruh SKPD, terutama Kabid/kasubbag penyusun program dan DPRD untuk menemukan titik temu yang sama mengenai perencanaan dan penganggaran.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia fungsional perencana pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan cara pelatihan dan bimtek mengenai seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran.
4. Peningkatan koordinasi antar bidang pada Dinas Pendidikan maupun dengan Bappeda.
5. Pembentukan sistem perencanaan elektronik dimana sistem perencanaan di Bappeda terkoneksi ke SIMDA yang dikendalikan oleh BPKAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Raharjo, 2014, "Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, edisi pertama cetakan kedua graha ilmu , Yogyakarta
- Aggarini Yunita dan Puranto Hendra, 2010, Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif, edisi pertama cetakan, Sekolah Tinggi Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Adesopo Ayo, 2011, Inventing Participatory Planning and Budgeting for Participatory

- Local Governance in Nigeria, International Journal of Business and social science
- Bastian Indra, 2009, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Caiden and Wildavsky, 1974, Planning and Budgeting in Poor Countries. Google Book.
- Elfrina Lidya, 2014, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran, dan Informasi Pendukung dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Egbide & Agbude, Good Budgeting and Good Governance : A Comparative Discourse, Departement of Accounting, school of Business College of Development Studies
- Fitry Ramadhiani, 2012, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010, Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
- Faustino, Cardoso Games, 2003, Manajemen Sumberdaya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kotler John P, 2001, What Leaders Really Do. Kepemimpinan dan Perubahan, Erlangga Jakarta
- Lerner Josh, 2012, By the People, For the People. Participatory Budgeting -from the Bottom Up in North Amerika, Journal of Deliberation
- Mahmudi, 2011, Akuntansi Sektor Publik, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta
- Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta
- Mulyati, S.Endang, 2010, Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009, Tesis Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlas Darise, 2006. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Nursini, 2011, Modeling Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan).
- Octavianti Rini, 2008, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan, Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas
- Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi periode 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra) periode 2010-2015, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 -2015, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Rasyid Abdul, 2010, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua
Renyowijoyo, Muindro, 2010, Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non laba, edisi
kedua, mita wacana media, Jakarta
Ruth Carlitz, 2006, Improving Transparency and Accountability in the Budget process :
An Assesment of Recent Intiatieves.
Syafrizal, 2009, Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Penerbit
Baduose Media, Padang
Solichah Imrotus Siti, Khusaini, 2013, Analisis Konsistensi Perencanaan dan
Penggangan di Kabupaten Tulung Agung (Studi pada Bidang Pendidikan dan
Kesehatan Tahun 2010-2012, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Brawijaya
Thulla H.B.K, 2010, Cost Benefit Analysis in Malaysia education,
Tiftikcigil Burcu Yayuz, 2015, An Assessment on Activities of Regional Development
Agencies in Turkey, International Jounal of Economics and Financial Issues
Thompson Nivek, 2012, Participatory budgeting-the Austalian Way, Adesopo Ayo,
2011, Inventing Participatory Planning and Bubgeting for Participatory Local
Governance in Nigeria, International Journal of Business and social science
Yandra Febie, 2011, Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010, Tesis Pasca Sarjana Universitas
Andalas
Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor
Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban
APBD (Berbasis kinerja). Bayumedia, Malang